



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NALLOM KURNIAWAN
2. Jabatan : PENELITI MUDA
3. NHK : 136545

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 359.468.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 239.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di JAKARTA TIMUR ,
Rp. 119.548.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 607.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AERIO MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 187.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 285.218.806**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.267.186.806

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.267.186.806



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.